



RENJA PERUBAHAN DUKCAPIL

RENCANA KERJA DUKCAPIL

TA. 2025

KATA PENGANTAR

Sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 mempedomani kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah disusun dalam Rencana Strategi (RKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam penyelenggaraan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 serta aspirasi masyarakat atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dokumen Rencana Kerja Perubahan 2025 ini akan menjadi pedoman dan panduan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dalam merealisasikan kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sepanjang sisa Tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja yang telah di susun.

Tiada gading yang tidak retak, oleh karena itu masukan, saran, dan pendapat yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk lebih menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Perubahan ini.

Makassar, Agustus 2025

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,**



Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19660902 198810 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	li
Daftar Tabel.....	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025 ...	8
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2025	41
BAB IV PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

2.1 Skala Kriteria Penilaian	8
2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	9
2.3 Program, Sasaran, Indikator, Target 2024, Realisasi 2024, Dan Target 2025..	11-12
2.4 Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan s.d Triwulan II Tahun 2025.....	14-36
3.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.....	42-49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, agar menyusun Dokumen Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut sebagai RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta memerintahkan seluruh Kepala daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja PD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan: Persiapan penyusunan renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Renja perubahan Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan Penyusunan rancangan Renja Pderubahan Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan Rancangan RKPD.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD Perubahan.
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah yang menjadi dokumen perencanaan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKAP Perangkat Daerah.
7. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 menjabarkan rencana kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, Pada penyusunan Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah yang dilakukan.

Renja Perubahan Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan RKPD Perubahan. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk diverifikasi. Hasil Verifikasi tersebut harus dapat menjamin Renja Perubahan Perangkat Daerah sudah selaras dengan Rancangan RKPD Perubahan. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan RKPDPerubahan menjadi RKPD Perubahan.

1.2. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1447);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 - Peraturan Menterian Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008- 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 0216 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301).
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2024.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ini disusun dengan maksud:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025;
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan ;
3. Menyelaraskan rencana strategis daerah dengan Renja Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.
4. Mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan disepanjang sisa tahun 2025;
2. Menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pelaksanaan Pembangunan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat antara lain; Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Monitoring Evaluasi (E-Monev) terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun berjalan 2025 Dan Capaian Renstra SKPD.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Berjalan 2025 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode (RPD) 2024- 2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan program, kegiatannya dan Sub Kegiatan.

Dalam Melakukan Evaluasi Keberhasilan atau kegagalan capain kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.1
Skala Kriteria Penilaian

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % $\geq$	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristikkomponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) *semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:*

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{*})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

- (2) *semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:*

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}^{**}) - (\text{Realisasi}^{*}) - \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ini akan dijelaskan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD. Pencapaian terhadap IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara ringkas digambarkan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Tata Kelola Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan} + \text{Jumlah KIA yang diterbitkan} + \text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun berkenaan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP} + \text{Jumlah Anak usia 0-17 tahun kurang sehari} + \text{Jumlah kelahiran di tahun berkenaan}} \times 100\%$	81%	86,63%
2.	Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi	Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan	86	78,13

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 sebanyak 2 (dua) indikator Kinerja Utama. Dari tabel di atas yaitu Indikator “Persentase Tata Kelola Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil” yang tergetnya sebesar 81% dan tercapai sebesar 86,63% atau kriteria **“Tinggi”** dan pada Indikator “Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan” yang targetnya sebesar 86 dan tercapai sebesar 78,13 atau kriteria **“Tinggi”**.

Evaluasi hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tentang capaian kinerja program dan kegiatan yang dikaitkan dengan target Renstra 2024-2026, RKPD Tahun 2024 dan RPJMD Provinsi Sulsel menunjukkan bahwa penganggaran dalam DPPA Tahun 2024 melebihi dari pagu anggaran yang ditargetkan dalam pagu Renja.

Untuk sasaran program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 memiliki 5 Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Adapun Prigram, Sasaran, Indikator, Target 2024, Realisasi 2024 dan Target 2025 dapat diliat Pada Table 2.3 Sebgai Berikut:

TABEL 2.3
PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR, TARGET 2024,
REALISASI 2024, DAN TARGET 2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET 2025	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baikdan Sangat Baik	100%	100%	100%	
		Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	100%	100%	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	99,45%	97,57%	99,50%	
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	50%	56,16%	52%	
		Persentase penerbitan KTP	99,45%	97,57%	99,50%	
		Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk	100%	98,53%	100%	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan	100%	100%	100%	
		Persentase Bayi ber akte kelahiran	97,60%	99,31%	97,80%	
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	51,1%	55,01%	51,15%	
		Persentase Penduduk umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	96,60%	98,32%	96,80%	
		Persentase penerbitan akta kelahiran	96,60%	96,60%	96,80%	

4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	100%	100%	100%	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyajian Profil dan data Kependudukan	100%	100%	100%	

Sumber Lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) APBD TA. 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, total alokasi anggaran adalah sebesar **Rp. 9.535.452.624,-** (Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Realisasi Fisik dan Keuangan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 atau Triwulan II Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sebesar **Rp. 4.398.555.764,-** (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 46,13% dan realisasi fisiknya sebesar 46,24% yang diinput melalui sistem monitoring dan evaluasi.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 914.614.381,- realisasinya sebesar Rp. 4.398.555.764,- atau 48,31% dan fisik 48,42%.

Program Pendaftaran Penduduk, pagu anggaran sebesar Rp. 361.110.200,0,- dimana realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0% dan persentase fisiknya sebesar 0% yang mencakup Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan.

Program Pencatatan Sipil, pagu anggaran sebesar Rp. 18.070.60,- dimana realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0% dan persentase fisiknya sebesar 0%, yang mencakup kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Provinsi dan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan pagu anggaran Rp. 180.72.450,- dimana realisasi keuangan sebesar Rp. 19.715.200,- atau 0% dan realisasi fisik 0%, yang mencakup Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi, dan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi.

Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.624.700,- dimana realisasi keuangan sebesar Rp. 30.870.000,- atau 0% dan realisasi fisik sebesar 0%, yang mencakup Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan.

Untuk lebih jelasnya data realisasi keuangan dan fisik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4. sebagai mana terlampir:

Tabel 2.4
Realisasi Keuangan dan Fisik
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan
s.d Triwulan II Tahun 2025

KODE REKENING					JENIS RINCIAN BELANJA	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN JUNI			REALISASI BULAN S/D BULAN JUNI			SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN JUNI
							KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
2.12.0.00.0.00.20.0000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9.535.452.624,0	914.614.381,0	9,59	9,28	4.398.555.764,0	46,13	46,24	5.136.896.860,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.105.686.624,0	914.614.381,0	10,04	9,71	4.398.555.764,0	48,31	48,42	4.707.130.860,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.750.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.750.300,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.01	0001		X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.750.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.750.300,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.01	0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.947.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.947.300,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.01	0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.01	0001	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.503.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.503.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.01	0001	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.01	0001	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.300.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.01	0002		X.XX.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.01	0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.01	0003		X.XX.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.01	0003	5.1.02.01.01.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

00 0				24	Kantor-Alat Tulis Kantor								
2.12.0.00.0.00.20.000 0	01	1.0 1	000 4		X.XX.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 1	000 4	5.1.02.01.01.00 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 1	000 4	5.1.02.01.01.00 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.000 0	01	1.0 1	000 5		X.XX.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 1	000 5	5.1.02.01.01.00 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 1	000 5	5.1.02.01.01.00 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.000 0	01	1.0 1	000 6		X.XX.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 1	000 6	5.1.02.01.01.00 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 1	000 6	5.1.02.01.01.00 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.000 0	01	1.0 1	000 7		X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 1	000 7	5.1.02.01.01.00 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 1	000 7	5.1.02.01.01.00 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 1	000 7	5.1.02.01.01.00 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 1	000 7	5.1.02.04.01.00 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.000 0	01	1.0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.322.982.528,0	866.490.236,0	11,83	11,45	4.157.935.039,0	56,78	56,89	3.165.047.489,0
2.12.0.00.0.00.20.000 0	01	1.0 2	000 1		X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.322.982.528,0	866.490.236,0	11,83	11,45	4.157.935.039,0	56,78	56,89	3.165.047.489,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.01.00 01	Belanja Gaji Pokok PNS	2.539.783.746,0	351.325.800,0	13,83	14,0	1.426.232.400,0	56,16	57,0	1.113.551.346,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PPPK	173.384.640,0	24.811.200,0	14,31	15,0	99.244.800,0	57,24	58,0	74.139.840,0

00 0				02									
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.02.00 01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	228.301.188,0	30.776.104,0	13,48	13,0	125.390.072,0	54,92	55,0	102.911.116,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.02.00 02	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.136.924,0	1.750.896,0	14,43	14,0	7.003.584,0	57,70	58,0	5.133.340,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.03.00 01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	123.695.000,0	17.300.000,0	13,99	14,0	69.200.000,0	55,94	56,0	54.495.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.04.00 01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	83.512.000,0	11.680.000,0	13,99	14,0	46.720.000,0	55,94	56,0	36.792.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.04.00 02	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.436.666,0	1.040.000,0	13,98	14,0	4.160.000,0	55,94	56,0	3.276.666,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.05.00 01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	87.087.000,0	11.650.000,0	13,38	13,0	47.870.000,0	54,97	55,0	39.217.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.05.00 02	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.793.500,0	1.090.000,0	13,99	14,0	4.360.000,0	55,94	56,0	3.433.500,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.06.00 01	Belanja Tunjangan Beras PNS	127.379.538,0	16.873.860,0	13,25	13,0	69.305.940,0	54,41	55,0	58.073.598,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.06.00 02	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.356.060,0	1.448.400,0	13,99	13,0	5.793.600,0	55,94	55,0	4.562.460,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.07.00 01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	36.859.811,0	11.486.419,0	31,16	31,30	24.802.538,0	67,29	68,30	12.057.273,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.07.00 02	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.081.798,0	347.193,0	32,09	31,20	694.386,0	64,19	64,20	387.412,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.08.00 01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.533,0	4.817,0	14,81	15,0	19.397,0	59,62	60,0	13.136,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.08.00 02	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.132,0	398,0	9,63	9,50	1.380,0	33,40	33,50	2.752,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.09.00 01	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	105.357.729,0	8.343.990,0	7,92	8,0	51.409.287,0	48,79	49,0	53.948.442,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.09.00 02	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	6.906.954,0	573.842,0	8,31	8,0	3.443.052,0	49,85	50,0	3.463.902,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.10.00 01	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.242.653,0	415.863,0	7,93	9,0	2.564.481,0	48,92	50,0	2.678.172,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.10.00 02	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	357.930,0	29.774,0	8,32	8,0	178.644,0	49,91	50,0	179.286,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 2	000 1	5.1.01.01.11.00 01	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	15.727.973,0	1.247.601,0	7,93	9,0	7.693.517,0	48,92	50,0	8.034.456,0

2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0001	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.073.765,0	89.320,0	8,32	8,0	535.920,0	49,91	50,0	537.845,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0001	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.200.804.336,0	123.858.243,0	10,31	10,0	708.300.498,0	58,99	59,0	492.503.838,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0001	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	824.931.068,80	87.716.250,0	10,63	9,0	510.231.105,0	61,85	61,0	314.699.963,80
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0001	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.382.995.583,20	140.535.266,0	10,16	9,0	799.000.438,0	57,77	57,0	583.995.145,20
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0001	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	332.580.000,0	22.095.000,0	6,64	7,0	141.740.000,0	42,62	43,0	190.840.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0001	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,0	0,0	0,0	0,0	2.040.000,0	25,0	26,0	6.120.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0003		X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0003	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0003	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0003	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0004		X.XX.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0004	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0004	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0007		X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0007	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0007	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0007	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0007	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0008		X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0008	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0008	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0008	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03	0001		X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03	0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03	0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03	0001	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03	0006		X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03	0006	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03	0006	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03	0006	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0002		X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0002	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0003		X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0003	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0003	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0005		X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0005	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0005	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0005	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0010		X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0010	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0010	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.634.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142.634.600,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0001		X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0001	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0002		X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.456.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.456.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6.271.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.271.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0002	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.185.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.185.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0003		X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0003	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0005		X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0005	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0006		X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0006	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0008		X.XX.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	10.001.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.001.600,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0008	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.600.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0008	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.401.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.401.600,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0009		X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.176.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124.176.800,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0009	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	124.176.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124.176.800,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0009	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0010		X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0010	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0010	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0011		X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0011	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0011	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0011	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.001.410.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.001.410.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0002		X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	858.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858.800.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0002	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0002	5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	858.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858.800.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0010		X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	142.610.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142.610.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0010	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0010	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	16.773.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.773.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0010	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	31.280.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.280.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0010	5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	85.648.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85.648.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0010	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.909.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.909.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.763.796,0	48.124.145,0	8,33	7,99	240.620.725,0	41,65	41,98	337.143.071,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.08	0002		X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.08	0002	5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.08	0004		X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa	577.763.796,0	48.124.145,0	8,33	7,99	240.620.725,0	41,65	41,98	337.143.071,0

000 0					Pelayanan Umum Kantor								
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 8	000 4	5.1.02.02.01.00 26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	537.600.000,0	44.800.000,0	8,33	8,0	224.000.000,0	41,67	42,0	313.600.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 8	000 4	5.1.02.02.01.00 30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 8	000 4	5.1.02.02.02.00 05	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	35.386.740,0	2.948.895,0	8,33	8,0	14.744.475,0	41,67	42,0	20.642.265,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 8	000 4	5.1.02.02.02.00 06	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.123.136,0	166.782,0	7,86	7,30	833.910,0	39,28	39,30	1.289.226,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 8	000 4	5.1.02.02.02.00 07	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.653.920,0	208.468,0	7,86	7,30	1.042.340,0	39,28	39,30	1.611.580,0
2.12.0.00.0.00.20. 000 0	01	1.0 9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.145.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44.145.400,0
2.12.0.00.0.00.20. 000 0	01	1.0 9	000 1		X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.779.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38.779.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 9	000 1	5.1.02.01.01.00 04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.821.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.821.500,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 9	000 1	5.1.02.02.01.00 67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.300.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 9	000 1	5.1.02.03.02.00 35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.657.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.657.500,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 9	000 1	5.1.02.03.02.00 38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20. 000 0	01	1.0 9	000 2		X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.366.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.366.400,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 9	000 2	5.1.02.01.01.00 04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.966.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.966.400,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 9	000 2	5.1.02.02.01.00 67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.400.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 9	000 2	5.1.02.03.02.00 35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.09	0002	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.09	0009		X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.09	0009	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.09	0010		X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.09	0010	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.09	0010	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.09	0010	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	361.110.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361.110.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.01			Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.01	0003		2.12.02.1.01.0003 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.01	0003	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.01	0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.01	0003	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02			Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	361.110.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361.110.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02	0001		2.12.02.1.02.0001 Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	361.110.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361.110.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02	0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	81.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81.200,0

2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02	0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	237.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237.600,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02	0001	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	744.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	744.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02	0001	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.400.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02	0001	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	75.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.800.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02	0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	233.847.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233.847.400,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02	0001	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.03			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.03	0002		2.12.02.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.03	0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.03	0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.03	0002	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.03	0002	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	18.070.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.070.600,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.01			Pelayanan Pencatatan Sipil	4.860.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.860.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.01	0004		2.12.03.1.01.0004 Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	4.860.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.860.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.01	0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.01	0004	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.01	0004	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.01	0004	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.860.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.860.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.02			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.02	0002		2.12.03.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.02	0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.02	0002	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.02	0002	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.02	0005		2.12.03.1.02.0005 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.02	0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.02	0005	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.03			Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	13.210.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.210.600,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.03	0001		2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	13.210.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.210.600,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.03	0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.210.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.210.600,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	19.715.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.715.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.01			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.715.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.715.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.01	0002		2.12.04.1.01.0002 Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	19.715.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.715.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.01	0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.01	0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.01	0002	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0													
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.01	0002	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.715.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.715.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.02			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.02	0005		2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.02	0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.02	0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.02	0005	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.02	0005	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0001		2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0002		2.12.04.1.03.0002 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0002	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0002	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.12.0.00.0.00.20.0000	05				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	30.870.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.870.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	05	1.01			Penyediaan Profil Kependudukan	30.870.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.870.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	05	1.01	0001		2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	30.870.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.870.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	05	1.01	0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.870.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.870.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	05	1.01	0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0008		X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0008	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0008	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.02	0008	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03	0001		X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03	0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03	0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03	0001	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03	0006		X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03	0006	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03	0006	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.03	0006	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0002		X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0002	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0003		X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0003	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0003	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0005		X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0005	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0005	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0005	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0010		X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0010	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.05	0010	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.634.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142.634.600,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0001		X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0001	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0002		X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.456.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.456.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6.271.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.271.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0002	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.185.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.185.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0003		X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0003	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0005		X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0005	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0006		X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0006	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0008		X.XX.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	10.001.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.001.600,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0008	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.600.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0008	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.401.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.401.600,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0009		X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.176.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124.176.800,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0009	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	124.176.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124.176.800,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0009	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0010		X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0010	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0010	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0011		X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0011	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0011	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.06	0011	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.001.410.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.001.410.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0002		X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	858.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858.800.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0002	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0002	5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	858.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858.800.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0010		X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	142.610.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142.610.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0010	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0010	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	16.773.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.773.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0010	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	31.280.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.280.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0010	5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	85.648.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85.648.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.07	0010	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.909.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.909.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.763.796,0	48.124.145,0	8,33	7,99	240.620.725,0	41,65	41,98	337.143.071,0

000 0													
2.12.0.00.0.00.20.000 0	01	1.0 8	000 2		X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 8	000 2	5.1.02.02.15.00 05	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.000 0	01	1.0 8	000 4		X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	577.763.796,0	48.124.145,0	8,33	7,99	240.620.725,0	41,65	41,98	337.143.071,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 8	000 4	5.1.02.02.01.00 26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	537.600.000,0	44.800.000,0	8,33	8,0	224.000.000,0	41,67	42,0	313.600.000,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 8	000 4	5.1.02.02.01.00 30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 8	000 4	5.1.02.02.02.00 05	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	35.386.740,0	2.948.895,0	8,33	8,0	14.744.475,0	41,67	42,0	20.642.265,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 8	000 4	5.1.02.02.02.00 06	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.123.136,0	166.782,0	7,86	7,30	833.910,0	39,28	39,30	1.289.226,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 8	000 4	5.1.02.02.02.00 07	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.653.920,0	208.468,0	7,86	7,30	1.042.340,0	39,28	39,30	1.611.580,0
2.12.0.00.0.00.20.000 0	01	1.0 9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.145.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44.145.400,0
2.12.0.00.0.00.20.000 0	01	1.0 9	000 1		X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.779.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38.779.000,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 9	000 1	5.1.02.01.01.00 04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.821.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.821.500,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 9	000 1	5.1.02.02.01.00 67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.300.000,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 9	000 1	5.1.02.03.02.00 35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.657.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.657.500,0
2.12.0.00.0.00.20.00 0	01	1.0 9	000 1	5.1.02.03.02.00 38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.000 0	01	1.0 9	000 2		X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.366.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.366.400,0
2.12.0.00.0.00.20.00	01	1.0 9	000 2	5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan	2.966.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.966.400,0

00 0				04	Pelumas								
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 9	000 2	5.1.02.02.01.00 67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.400.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 9	000 2	5.1.02.03.02.00 35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 9	000 2	5.1.02.03.02.00 38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0 000 0	01	1.0 9	000 9		X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 9	000 9	5.1.02.03.03.00 01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0 000 0	01	1.0 9	001 0		X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 9	001 0	5.1.02.03.02.01 21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 9	001 0	5.1.02.03.02.04 05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	01	1.0 9	001 0	5.1.02.03.02.04 09	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0 000 0	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	361.110.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361.110.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0 000 0	02	1.0 1			Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0 000 0	02	1.0 1	000 3		2.12.02.1.01.0003 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	02	1.0 1	000 3	5.1.02.01.01.00 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	02	1.0 1	000 3	5.1.02.01.01.00 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0 00 0	02	1.0 1	000 3	5.1.02.04.01.00 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02			Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	361.110.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361.110.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02	0001		2.12.02.1.02.0001 Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	361.110.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361.110.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02	0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	81.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02	0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	237.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237.600,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02	0001	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	744.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	744.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02	0001	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.400.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02	0001	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	75.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.800.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02	0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	233.847.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233.847.400,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.02	0001	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.03			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.03	0002		2.12.02.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.03	0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.03	0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.03	0002	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	02	1.03	0002	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	18.070.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.070.600,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.01			Pelayanan Pencatatan Sipil	4.860.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.860.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.01	0004		2.12.03.1.01.0004 Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	4.860.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.860.000,0

2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.01	0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.01	0004	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.01	0004	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.01	0004	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.860.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.860.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.02			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.02	0002		2.12.03.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.02	0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.02	0002	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.02	0002	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.02	0005		2.12.03.1.02.0005 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.02	0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.02	0005	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.03			Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	13.210.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.210.600,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.03	0001		2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	13.210.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.210.600,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	03	1.03	0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.210.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.210.600,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	19.715.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.715.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.01			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.715.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.715.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.01	0002		2.12.04.1.01.0002 Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di	19.715.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.715.200,0

					Provinsi dan Kabupaten/Kota								
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.01	0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.01	0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.01	0002	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.01	0002	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.715.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.715.200,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.02			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.02	0005		2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.02	0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.02	0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.02	0005	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.02	0005	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0001		2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0002		2.12.04.1.03.0002 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0002	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	04	1.03	0002	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	05				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	30.870.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.870.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	05	1.01			Penyediaan Profil Kependudukan	30.870.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.870.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	05	1.01	0001		2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	30.870.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.870.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	05	1.01	0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.870.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.870.000,0
2.12.0.00.0.00.20.0000	05	1.01	0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sumber: E-Money Per Juni 2025

Isu-Isu Pentingnya Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Kriteria penentuan isu-isu strategis mencakup:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

Berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah yang berkenaan dengan penentuan isu-isu strategis, akan dijelaskan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Gubernur diatur dalam UU No 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mencakup:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Pemberian Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
4. Penyajian Data Kependudukan Berskala Provinsi Berasal dari Data Kependudukan yang Telah Dikonsolidasikan dan Dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab; dan
5. Koordinasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ruang lingkup pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari 4 (empat) Program Urusan:

1. Pendaftaran Penduduk;
2. Pencatatan Sipil;
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Profil Kependudukan,

Dalam implementasi pembagian kewenangan urusan tersebut, pemerintah daerah provinsi diberikan terbatas hanya pada penyusunan profil kependudukan, sedangkan tiga kewenangan yang lainnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan kriteria diatas berikut diproyeksikan kondisi-kondisi dan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan dan kewenangan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh Pemerintah provinsi. Isu-isu strategis yang dimaksud yaitu :

1. Pemanfaatan data kependudukan yang belum optimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan mengamanahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan data kependudukan khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, dan berdasarkan permendagri 102 tahun 2019 bahwa ketentuan dalam melakukan perjanjian kerjasama harus memiliki sertifikat ISO 27001 terkait keamanan sistem dan jaringan.

2. Cakupan Perekaman Penduduk.

Kondisi capaian perekaman penduduk pada semester II tahun 2024 adalah 99,30%. Persentase ini telah mencapai target nasional 100%, ditambah lagi dengan persiapan pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024 yang mewajibkan pemilih memiliki KTP-el, maka kondisi capaian perekaman mesti menjadi *concern* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Cakupan kepemilikan akte kelahiran 0-17 Tahun.

Cakupan penerbitan akta kelahiran untuk tahun 2022 yaitu 97%, persentase ini telah mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan data pelayanan kabupaten/kota. Hal ini dimungkinkan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk membuat akta kelahiran bagi anaknya.

4. Penerapan Buku Pokok Pemakaman.

Buku pokok pemakaman merupakan salah satu indikator penilaian kinerja dan levelisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, minimal sebanyak 10 (sepuluh) buku pokok pemakaman per kabupaten/kota pada tahun 2022. Penerapan buku pokok pemakaman merupakan pelaporan kematian dari tempat pemakaman yang ada di kabupaten/kota untuk meningkatkan cakupan Akta Kematian.

5. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sebagai upaya pemenuhan identitas kependudukan bagi seluruh penduduk khususnya bagi anak kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Adapun target nasional untuk tahun 2022 yaitu 40%. dan capaian data kepemilikan kartu identitas anak untuk tahun 2022 telah mencapai 54,32% dari capaian pelayanan. hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KIA, dan untuk meningkatkan cakupan KIA di Sulawesi Selatan maka dukcapil kab/kota harus melakukan inovasi dengan melakukan kerjasama

dengan berbagai pihak untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA.

6. Pengembangan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Dengan terbitkannya permendagri tersebut komitmen Ditjen Dukcapil yang dimana layanan adminduk berbasis digital menjadi meningkat dengan adanya Digital Id (KTP Elektronik) dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan public tanpa membawa fisik KTP, hal ini mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi kegiatan prioritas dalam melakukan meningkatkan dokumen kependudukan berbasis Digital Id skala Provinsi Sulawesi Selatan dan mendukung program Pemerintah Pusat dalam meningkatkan Layanan Adminduk Berbasis Digital.

7. Penduduk Non Permanen.

Berdasarkan Permendagri 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen yang mana Penduduk Non Permanen adalah penduduk warga negara Indonesia atau asing yang bertempat tinggal diluar domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya yang paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap, hal ini banyak terjadi di beberapa kabupaten/kota di provinsi Sulawesi selatan khususnya di kota makassar, sehingga butuh perhatian khusus untuk melakukan pendataan penduduk sesuai dengan prosedur yang berlaku tentang penduduk non permanen.

8. Isu Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Pusat memberikan intruksi agar memberikan atensi khusus untuk menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia agar menargetkan Kemiskinan Ekstrem turn mendekati persentase 0% di tahun 2024. Perhatian ini sesuai amanat Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat mempedomani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 agar program kegiatan bisa mendukung Kemiskinan Ekstrem di wilayah yang terdampak Kemiskinan Ekstrem khususnya di wilayah 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemiskinan Ekstrem erat kaitannya dengan data kependudukan, maka dengan ini Ditjen Dukcapil Kemendagri RI memberikan arahan kepada seluruh Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat melakukan pemutahiran Data Kpendudukan dengan melakukan kolaboaratif kepada OPD/Lembaga agar dapat melakukan pemanfaatan data kependudukan agar OPD/Lembaga yang menangani kemiskinan ekstrem dapat dengan mandiri melakukan penyandingan/pemutahiran data kependudukan agar data penerima bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai yang diharapkan.

Adapun peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan terkait Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan kewenangan yang telah diatur berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yaitu pemutahiran data penduduk *by name by addres* berdasarkan Nomor Induk Kependuduk (NIK) dan berdasarkan Permendagri 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Data Kependudukan OPD dapat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sehingga OPD terkiat dapat

langsung melakukan Pemutahiran Data Kependudukan by name by addres berdasarkan NIK serta saling berkolaborasi dengan Perangkat Daerah yang menangani Kemiskinan Ekstrim agar apa yang ditargetkan dapat tercapai,

9. Isu Disabilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akuntabilitas Terhadap Permukiman, Layanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan ini mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat memfasilitasi permukiman yang mudah di akses bagi penyandang disabilitas, hal ini selaras dengan komitmen Ditjen Dukcapil Kemendagri RI agar Provinsi dan Kabupaten/kota dapat mendorong peningkatan layanan khusus bagi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan fasilitas pelayanan public yang mudah serta memastikan keterpenuhan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas.

10. Isu *Stunting*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan *Stunting* yang dimana *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai panjang dan tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. hal ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar bersama-sama melakukan kerja sama multisektor dan saling kolaborasi di tingkat pusat, daerah dan desa.

11. Isu Pengarusutamaan Gender.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, hal ini menajdi perhatian khusus kepada pemerintah daerah agar kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesamaan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, kemanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Sulawesi Selatan antara lain :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatata sipil dengan perangkat daerah kabupaten/ kota;
3. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
4. Masih minimnya alokasi anggaran dari APBD untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

BAB III
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN
KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA TAHUN
2025

Review terhadap rancangan Perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD.

Review terhadap RKPD yang meliputi identifikasi program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan setiap program/kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan sampai dengan TW II Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, di hampir semua sub kegiatan mengalami pengurangan anggaran kecuali sub kegiatan berikut :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, yang awalnya tidak dianggarkan pada anggaran Pokok tahun 2025 diusulkan untuk dianggarkan pada anggaran Perubahan tahun 2025 sebesar RP. 858.800.000,- untuk memfasilitasi pengadaan Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan yang merupakan salah prioritas Gubernur Sulawesi Selatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat.
2. Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk, diusulkan untuk kenaikan anggaran sebesar RP. 220.877.200,- untuk memfasilitasi Kegiatan KISAK (Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) di 10 Kab/Kota di Sulawesi Selatan, kegiatan merupakan program prioritas untuk meningkatkan kepemilikan Administrasi Kependudukan dan juga kegiatan yang mendukung isu Gender dimana kegiatan KISAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan PPK yang melibatkan lebih banyak kaum Perempuan

Adapun perubahan Penambahan/Pengurangan anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1

TABEL 3.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN RENCANA KERJA
PERUBAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025	PARSIAL I 2025	RKA PERUBAHAN	SELISIH	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	9=5-7	10
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10.234.099.083	9.535.452.624	10.049.764.872	184.334.211	Turun
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100%	9.934.089.083	9.105.686.624,0	9.620.231.872	313.857.211	Turun
		Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 Nilai					
		Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100%					
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	169.136.600	16.750.300,0	6.828.300	162.308.300	Turun
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	59.820.000	16.750.300,0	6.828.300	52.991.700	Turun
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	-	-	5.000.000	Turun
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	-	-	5.000.000	Turun
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	-	-	5.000.000	Turun
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	-	-	5.000.000	Turun

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000	-	-	5.000.000	Turun
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	84.316.600	-	-	84.316.600	Turun
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan tepat waktu	100%	8.301.549.275	7.322.982.528,0	7.837.294.776	464.254.499	Turun
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	8.175.165.275	7.322.982.528,0	7.837.294.776	464.254.499	Turun
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	35.810.000	-	-	35.810.000	Turun
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	5.000.000	-	-	5.000.000	Turun
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	80.574.000	-	-	80.574.000	Turun
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	-	-	5.000.000	Turun
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dikelola oleh Perangkat Daerah	100%	19.116.150	-	-	19.116.150	Turun
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.047.150	-	-	10.047.150	Turun
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.069.000	-	-	9.069.000	Turun
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	21.946.100	-	-	21.946.100	Turun

2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.463.600	-	-	4.463.600	Turun
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	12.256.400	-	-	12.256.400	Turun
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undan	30 Orang	5.226.100	-	-	5.226.100	Turun
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	100%	412.747.400	142.634.600,0	152.556.600	260.190.800	Turun
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.518.400	-	-	7.518.400	Turun
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.456.200	8.456.200,0	8.456.200,0	0	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.054.800	-	-	10.054.800	Turun
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.739.000	-	-	10.739.000	Turun
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000	-	-	3.600.000	Turun
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	67.290.600	10.001.600,0	10.001.600,0	57.289.000	Turun
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	289.537.600	124.176.800,0	134.098.800	155.438.800	Turun
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.610.800	-	-	10.610.800	Turun

9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4.940.000	-	-	4.940.000	Turun
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	142.610.000	1.001.410.000,0	1.001.647.000	859.037.000	Naik
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	-	858.800.000,0	858.800.000,0	858.800.000,0	Tidak dianggarkan di RKPD Pokok 2025
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	142.610.000	142.610.000	142.847.000	237.000	Naik
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	616.702.558	577.763.796,0	577.763.796,0	38.938.762	Turun
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5.158.090	-	-	5.158.090	Turun
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	611.544.468	577.763.796,0	577.763.796,0	33.780.672	Turun
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	250.281.000	44.145.400,0	44.141.400	206.139.600	Turun
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	153.079.000	38.779.000,0	38.775.000	114.304.000	Turun
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	69.002.000	5.366.400,0	5.366.400,0	63.635.600	Turun
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	28.200.000	-	-	28.200.000	Turun
II	PROGRAM PENDAFTARAN	Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	99,25%	759,514,876.00				

	PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99,25%		361.110.200,0	360.877.200	398.637.676	Turun
		Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk	100%					
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	52%					
I	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan pelayanan yang mendapatkan Pendaftaran Penduduk	100%	45.913.300	-		45.913.300	Turun
2	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1 Dokumen	45.913.300	-		45.913.300	Turun
J	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	34.880.700	361.110.200,0	360.877.200	325.996.500	Naik
1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	140.000.000.00	361.110.200,0	360.877.200	220.877.200	Naik
K	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	28.034.000	-	-	28.034.000	Turun
5	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	28.034.000	-	-	28.034.000	Turun
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kematian yang Dilaporkan	100%	41.182.000	18.070.600,0	18.070.600,0	23.111.400	Turun
		Persentase Bayi Ber-Akta Kelahiran	97,8%					
		Persentase Pasangan Ber-Akta Nikah yang Dilaporkan	39,95%					
		Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	96,8%					
		Persentase Penerbitan Akta Cerai yang Dilaporkan	100%					

		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	96,8%					
L	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	23.258.600	4.860.000,0	4.860.000,0	18.398.600	Turun
1	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	23.258.600	4.860.000,0	4.860.000,0	18.398.600	Turun
M	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah Laporan yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	4.712.800	-	-	4.712.800	Turun
2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	3.548.000	-	-	3.548.000	Turun
3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1.164.800	-	-	1.164.800	Turun
N	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	13.210.600	13.210.600,0	13.210.600,0	0	
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	13.210.600	13.210.600,0	13.210.600,0	0	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKA	Cakupan Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	100%	118.821.000	19.715.200,0	19.715.200,0	99.105.800	Turun
O	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemenuhan Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	58.760.800	19.715.200,0	19.715.200,0	39.045.600	Turun

1	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	58.760.800	19.715.200,0	19.715.200,0	39.045.600	Turun
P	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Kab/Kota/Lembaga yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	28.425.400	-	-	28.425.400	Turun
3	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	28.425.400	-	-	28.425.400	Turun
Q	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Laporan Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	31.634.800	-	-	31.634.800	Turun
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	25.790.000	-	-	25.790.000	Turun
2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	30 Orang	5.844.800	-	-	5.844.800	Turun
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyajian Profil Kependudukan	100%	31.179.000	30.870.000,0	30.870.000,0	309.000,00	Turun
R	Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Ketersediaan Profil dan data Kependudukan skala Provinsi	1 Dokumen	31.179.000	30.870.000,0	30.870.000,0	309.000,00	Turun
1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen	31.179.000	30.870.000,0	30.870.000,0	309.000,00	Turun

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai Triwulan II yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target telah disesuaikan dengan Data Kinerja Renstra 2024-2026 sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan telah menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri dan sudah di update oleh Biro Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Selatan, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada Pengurangan pagu indikatif sebesar **Rp. 184.334.211,-** atau **1,80%** dari anggaran Pokok **Rp. 10.234.099.083,-** menjadi anggaran perubahan **Rp. 10.049.764.872,-** perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19660902 198810 1 001

**SEKIAN DAN
TERIMA KASIH**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025**

